

# **MENGELABORASI *EDUCATION FOR ALL* DENGAN PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MENUMBANGKAN HEGEMONI DISKRIMINASI PENDIDIKAN**

**Uswatun Hasanah<sup>1\*</sup>, Novita Kurniasih<sup>2</sup>, Indah Kurniawati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Dosen FTIK IAIN Metro, Jln. Ki Hajar Dewantara 15 A, Iringmulyo, Metro Timur, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Mahasiswa FTIK IAIN Metro, Jln. Ki Hajar Dewantara 15 A, Iringmulyo, Metro Timur, Lampung, Indonesia

\*Corresponding author, tel/fax: 085269061789, email: u.hasanah19@rocketmail.com

***Abstract: Collaborating Education for All and Inclusive Education to overcome the Hegemony of Educational Discrimination.*** This article focuses on the study of the dynamics of one the world agendas, "Education For All" which has been sparked since several decades ago. This article begins with a history of one of the international programs, namely: "International Education for All". The program stands to highlight children who experience discrimination, especially to children with special needs or to children with disabilities. The reality is that 70 percent of children with special needs in Indonesia still have not received the feasibility of education. One of them lies in the general stigma that the child is difficult to receive education and only meet the class, and schools that lack the resources to deal with these children. In response to this, the international community is keen to conduct "inclusive education" whose main purpose is to eliminate discrimination and provide equal rights to every child. Using the library research method, we will highlight international interests that can create real opportunities and commitments in providing quality education for all children. In the end, this article will reconcile the relationship between EFA and inclusive education, and advocate major steps that practitioners and policymakers can take in collaborating and that are appropriate to the context, policy, and practice realization.

***Keywords:*** Education for All, Inclusive Education, Discrimination Hegemony

***Abstrak: Mengelaborasi Education For All dengan Pendidikan Inklusi dalam Menumbangkan Hegemoni Diskriminasi Pendidikan.*** Karya ini salah satunya berfokus pada kajian mengenai dinamika salah satu agenda dunia, "Education For All" yang telah dicetuskan sejak beberapa dasawarsa lalu. Tulisan dalam artikel ini diawali dengan sejarah mengenai salah satu program internasional, yaitu: "Internasional Education for All". Program ini berdiri untuk menyoroti anak-anak yang mengalami diskriminasi, khususnya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun pada anak-anak disabel. Realitas yang ada 70 persen dari anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih belum menerima kelayakan pendidikan. Hal ini salah satunya terletak pada stigma umum bahwa anak tersebut susah untuk menerima pendidikan dan hanya memenuhi kelas saja, serta sekolah yang kekurangan sumber daya dalam menangani anak-anak tersebut. Menanggapi hal tersebut, dunia internasional gencar untuk mengadakan "pendidikan inklusi" yang tujuan utamanya untuk meniadakan diskriminasi dan memberikan hak yang sama pada setiap anak. Menggunakan metode library research, kami akan menyoroti mengenai

*kepentingan internasional yang dapat menciptakan peluang dan komitmen nyata dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak. Pada bagian akhir, artikel ini akan merekonsepsi hubungan antara EFA dan pendidikan inklusi, dan menganjurkan langkah besar yang dapat diambil oleh para praktisi dan pembuat kebijakan di dalam upayanya berkolaborasi dan yang sesuai dengan konteks, kebijakan, serta dalam realisasi praktik.*

**Kata Kunci:** *Education for All, Pendidikan Inklusi, Hegemoni Diskriminasi*

## **Pendahuluan**

Sensitivitas gender merupakan tema hangat yang menyita banyak perhatian bagi para akademisi, peneliti, dan lainnya yang direpresentasikan dengan berbagai jurnal, buku, dan berbagai penelitian lainnya, bahkan pusat-pusat studi gender dibangun di berbagai lembaga tinggi demi tercapainya tujuan anti-diskriminasi gender. Di tengah derasnya usaha meniadakan diskriminasi gender, tanpa sadar ada diskriminasi lain yang ada di depan mata, salah satunya diskriminasi yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus dan difabel di dalam pendidikan. Paham *ableism* yang mengukur manusia dengan melihat kemampuan fisik tanpa sadar dimiliki masyarakat yang menjadi sumber penindasan. Paham *ableism* merupakan sebuah paham yang mengkotakkan manusia dalam dua kelompok yaitu kelompok yang mampu dan tidak mampu. Pengkotakkan ini didasarkan pada pandangan manusia normal adalah mereka yang sempurna fisik dan rohaninya, dan kelompok selanjutnya mereka yang tidak mampu atau difabilitas (Yusainy, Thohar, dan Gustomy 2016, 2). Berawal dari paham ini maka muncul konsep, cara pandang, dan sikap yang memberikan perlakuan berbeda bagi manusia lain. Banyak orang yang memiliki kemampuan berbeda dalam segi fisik harus tersingkirkan dari dunia pendidikan dan pekerjaan.

Penyandang difabilitas di dunia terdapat sekitar 15% dari total jumlah penduduk dunia yang apabila dalam hitungan bilangan terdapat milyaran

orang yang menyandang difabilitas. Untuk anak-anak sendiri, UNICEF menunjukkan data sekitar 150 juta anak di dunia menyandang status sebagai penyandang difabilitas (UNICEF 2005). Di Indonesia terdapat sekitar 12,29% atau sekitar 31,2 juta jiwa dari penduduknya yang berusia di atas dua tahun merupakan penyandang difabilitas menurut hasil dari “Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2018” (Hastuti dkk. 2019, 14). UNESCO dalam laporannya mengemukakan terdapatnya sepertiga dari total 75 juta anak yang tidak dapat memperoleh haknya dalam mengenyam pendidikan adalah para penyandang disabilitas. (UNESCO 2008).

Meskipun tata peraturan perundangan telah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi seluruh rakyatnya, akan tetapi kasus diskriminasi dalam bidang pendidikan khususnya masih saja terjadi. Retorika yang berkembang saat ini, pendidikan inklusi adalah salah satu program dalam mengatasi hambatan pada dunia pendidikan dan pengembangan. Beberapa penyandang difabilitas dan anak berkebutuhan khusus, khususnya pada beberapa organisasi internasional telah memulai langkahnya dalam memperjuangkan hak bagi mereka. Gerakan mereka kebanyakan difokuskan untuk hal tersebut hingga lupa untuk mengembangkan dan meningkatkan lingkungan belajar mengajar yang ramah bagi semua anak. Menanggapi hal tersebut, maka beberapa pihak dengan gencar menyuarakan pendidikan yang ramah bagi semua anak termasuk anak-

anak difabel dan berkebutuhan khusus sesuai dengan perasaman hak yang dimiliki.

Beberapa tulisan mengenai “*Education for All*” sudah pernah ditulis oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah kajian yang dituliskan oleh “Indra Kusumawardhana & Arry Bainus” yang mengangkat judul: “*A Coxian Approach: Mengungkap Hegemoni Agenda ‘Education For All’ terhadap Negara Berkembang*”. Pada tulisan ini mereka mencoba untuk mengungkap hegemoni etis yang ada pada EFA dimana ia merupakan produk dari agenda pendidikan dunia mampu membenamkan hegemoni terhadap kebijakan pendidikan yang dilaksanakan di negara-negara berkembang dengan menggunakan pendekatan Cox (Kusumawardhana dan Bainus 2012). Adapun artikel kami mencoba mendialogkan antara konsepsi “*Education for All*” dengan pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Selanjutnya tulisan yang diberi judul “Pendidikan Inklusif sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua” ditulis oleh Abdul Rahim menuliskan gagasannya mengenai pendidikan inklusi serta kiat-kiat atau strategi bagi pendidik dan institusi untuk menjadikan sekolah yang ramah terhadap anak difabel. Jika penelitian tersebut membahas demikian, maka dalam tulisan kami tidak hanya membahas mengenai pendidikan inklusi akan tetapi juga mengenai hubungan yang terjadi dengan konsepsi serta praktisi dari “*Educational for All*” (Rahim 2016). Lalu Suyahman dalam tulisannya yang berjudul “Pendidikan untuk Semua antara Harapan dan Kenyataan” mengungkapkan bahwa *education for all* merupakan sebuah harapan yang dapat membantu anak-anak dari masyarakat minoritas dan penyandang difabel untuk dapat bersekolah hingga jenjang paling tinggi sekalipun tanpa adanya pembeda (Suyahman 2016). Di dalam artikel

tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai kontradiksi antara harapan dan kenyataan dari pendidikan untuk semua, selain itu tulisan ini juga tidak menyoroti secara lebih dalam mengenai pendidikan inklusi. Tulisan kami akan mencoba untuk mengungkap konsepsi “*Education for All*” dan pendidikan inklusi serta hal-hal yang berhubungan dengan keduanya.

### **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dan *library research*. Metode penelitian yang sifatnya deskriptif analitis akan diperoleh data yang dituangkan ke dalam bentuk kualitatif atau tulisan bukan ke dalam bentuk bilangan atau kuantitatif, hal ini akan menimbulkan pemaknaan yang lebih kaya dan mendalam (Zuriah 2006, 94). Berbagai literatur akan menjadi sumber dalam penelitian kami, baik dari jurnal, buku-buku, artikel, catatan, laporan, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumber-sumber data yang akan kami gunakan, maka metode pengumpulan data yang kami terapkan adalah metode *library research* (Nadzir 2003, 27).

### **“Education For All” dan Konsepsi Pendidikan Inklusi**

*Education for All* merepresentasikan komitmen internasional untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua anak dan semua usia. Pendidikan begitu diperdebatkan, pendidikan memungkinkan seorang individu dapat hidup dengan lebih bermartabat dan mengembangkan kapasitasnya secara penuh (UNESCO 1990). Pendidikan bagaikan dua mata pisau disatu sisi jika ia dimanfaatkan secara optimal maka ia dapat mengubah dunia menjadi lebih baik, dan berlaku sebaliknya. Pendidikan dapat digunakan sebagai sarana dalam menyampaikan pesan perdamaian, kebebasan dan keadilan sosial, selain itu,

pendidikan juga dapat berpotensi digunakan sebagai kendaraan dalam penguatan otoriter, praktik diskriminatif, serta anti-demokrasi bagi masyarakat. Kita dapat mengambil contoh kasus internasional yaitu kejahatan genosida di Rwanda dimana guru ikut berperan di dalamnya. Selanjutnya perlakuan yang diterima oleh anak-anak perempuan yang bersekolah di Zimbabwe dari murid laki-laki dan guru laki-lakinya, serta kejahatan-kejahatan diskriminasi lainnya

Dunia internasional sudah memandang penting sebuah pendidikan terutama pada anak-anak, bahkan secara internasional, pendidikan sudah menjadi hak setiap anak. Beberapa dekade lalu, tepatnya pada tahun 1989 “*UN General Assembly*” mengadopsi “*The Convention on The Rights of the Child*” yang mengikrarkan “*Make primary education compulsory and available free to all*” (Ki-Moon 2007, 38). Setahun berselang, maka diadakanlah sebuah pertemuan di Jomtien, Thailand pada tahun 1990 yang membahas mengenai kelanjutan pertemuan lalu mengenai hak anak dalam pendidikan. Ikrar tersebut diprakarsai negara-negara global sebagai komitmen untuk meningkatkan partisipasi anak di dalam pendidikan sekolah yang masih sangat rendah karena diskriminasi gender, budaya, hingga fisik. Ikrar tersebut kemudian memunculkan perkembangan yang lebih spesifik. Lima tahun berselang, sebagai wujud keseriusan komitmen global tersebut, maka diadakanlah “*The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*” tahun 1995. Deklarasi ini berhasil mengumpulkan 92 negara dan 25 organisasi internasional. Mereka semua berkumpul di Salamanca, Spanyol untuk mendukung suksesi “*Education for All*” dengan menyamakan persepsi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan.

*Education for All* atau EFA merepresentasikan komitmen

internasional untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua anak dan semua usia. Pendidikan begitu diperdebatkan, pendidikan memungkinkan seorang individu dapat hidup dengan lebih bermartabat dan mengembangkan kapasitasnya secara penuh (UNESCO 1990). Gerakan mengenai layanan pendidikan bagi semua atau di dunia internasional dikenal dengan “*Education for All*” telah dimulai sejak hampir tiga dasawarsa. Konferensi-konferensi dunia yang dilaksanakan pada tahun 90-an yang telah melahirkan sebuah gagasan besar yang mampu menggerakkan massa global terhadap dunia pendidikan internasional. Gagasan ini digemakan sebagai “*Education for All*”. Konferensi ini sangat penting karena di dalamnya termuat komitmen untuk mengakui para siswa yang seringkali dikucilkan dari jamahan dunia pendidikan. Pada konsepsi ini disajikan visi pendidikan yang konsepnya melebihi dari sekedar konsep sekolah, dimulai dengan anak usia dini, penekanan pada literasi bagi perempuan, serta mengakui pentingnya dasar pendidikan sebagai bagian dari belajar seumur hidup. Ide besar dari EFA inilah yang membuat konsep pendidikan inklusif semakin meningkat tajam.

EFA merupakan sebuah rancangan berkenaan dengan pemerataan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang dan status sosial. EFA seharusnya lebih dimaknai sebagai sebuah upaya nyata tidak hanya sekedar slogan yang terpampang saat kampanye. EFA digadang merupakan wujud nyata dari penjabaran UUD 1945 mengenai perihal pendidikan bagi setiap warga negaranya..

Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat “Sekolah Luar Biasa” yang diperuntukkan bagi kaum difabel. Tujuan dari pengelompokan ini sebenarnya baik, karena beralasan

sebagai sarana untuk mempermudah pengajar dalam merencanakan dan menyampaikan pembelajaran. Akan tetapi, adanya SLB bagi kaum difabilitas mengundang ketidakuntungan yang notabene sebagai objek itu sendiri. Pembelajaran yang dilakukan di SLB cenderung lambat sehingga mengharuskan anak-anak difabel memacu belajarnya agar mampu mengejar ketertinggalannya apabila mereka masuk ke perguruan tinggi. Pemisahan pendidikan bagi kaum difabel dengan anak-anak normal seharusnya diikuti dengan berdirinya perguruan tinggi luar biasa bagi mereka yang melanjutkan pendidikan tingginya. Jika terjadi pemisahan pendidikan dengan kaum difabel dan kaum non difabel, maka kaum difabel tidak akan dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Kedua alasan di atas merupakan beberapa alasan yang menguatkan mengenai model pendidikan inklusi sebagai model pendidikan Indonesia. Pendidikan inklusi diharapkan untuk mampu dalam menjamin terwujudnya "*Education for All*" sebagai salah satu upaya menumbangkan hegemoni diskriminasi dan kesetaraan yang sudah mengakar. Model pendidikan inklusi dianggap sebagai model pendidikan yang akan mampu menjamin bagi terwujudnya prinsip "*education for all*" sebagai salah satu cara untuk memberantas diskriminasi dan kesetaraan, sebagai strategi untuk mendorong adanya demokratisasi, serta sebagai alat untuk menghapus marginalisasi atas sekelompok manusia (Asyhabuddin 2008, 4).

Terdapat banyak anggapan mengenai pendidikan inklusif sebagai salah satu upaya yang dikembangkan pemerintah bagi terselenggaranya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dan difabilitas untuk mengatasi rendahnya presentase anak berkebutuhan khusus dan difabel yang bersekolah. Indonesia merupakan salah satu dari

negara global yang mendukung terealisasinya pendidikan inklusi agar angka partisipasi sekolah meningkat (Rezeki dan Rusyidi 2015, 230). perwujudan komitmen Indonesia dalam menyukseskan "*Education for All*" terlihat dengan dijabarkannya landasan yuridis dan landasan filosofis serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mewujudkannya.

Di Indonesia sendiri mengenai pelaksanaan pendidikan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi yang telah tertuang dalam tata aturan perundangan RI. Aturan pemerintah yang terealisasi melalui "UU Nomor 20 tahun 2003" mengenai "sistem pendidikan nasional telah dibuat dan secara tegas mengatur mengenai pemerataan terhadap hak dan kewajiban bagi tiap warganya dalam mengakses pendidikan. Selanjutnya pendidikan diselenggarakan atas prinsip yang harus dipegang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No 20 tahun 2003. Dalam pasal ini menyatakan dengan jelas bahwa "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa" (Elisa dan Wrastari 2013, 2). Selain itu, aturan-aturan baru seperti,

Indonesia memunculkan pendidikan inklusi tidak hanya sebagai bentuk dukungan bagi terciptanya "*Education for All*" saja, akan tetapi juga merupakan upaya bagi pemberian pendidikan untuk mereka yang tinggal di pedesaan. Buku Profil Anak Indonesia memberikan data bahwa sebanyak 35,25% anak dengan disabilitas belum/tidak pernah sekolah, 43,13% tidak/belum tamat SD. Selain itu, disebutkan pula sebanyak 36,66% anak dengan disabilitas di pedesaan belum/tidak sekolah sedangkan 19,98% lainnya putus sekolah, dan sisanya

sekolah (Rezeki dan Rusyidi 2015, 230). Dengan angka tersebut, perjalanan dalam menggai tujuan nasional pendidikan terasa akan semakin jauh.

### **Education For All dalam Pendidikan Inklusi: Upaya Menumbangkan Diskriminasi**

Di dalam abad ke-21 dimana semuanya membutuhkan pembaharuan supaya dapat terlihat eksistensinya dan dapat bersaing secara global, Indonesia dalam hal pembangunan manusianya khususnya pendidikan dihadapkan pada tiga tantangan besarnya. Pertama, akibat dari krisis ekonomi yang pernah melanda pada era 90-an, maka pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era globalisasi, pendidikan dituntut untuk mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi memadai agar ia dapat bersaing dalam bursa kerja global. Ketiga, dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka perlu dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga keragaman atas kebutuhan ataupun daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakatnya (Taqiyuddin 2005, 89–90). Diperlukan upaya yang saling menguatkan antara berbagai sektor pendidikan dalam menjawab tantangan tersebut.

Di Indonesia sendiri, pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) pada sekolah inklusi dapat dilaksanakan dengan kombinasi model-model berikut ini:

#### 1. Kelas Reguler

ABK akan belajar dengan non-ABK sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum sebagaimana diterapkan pada anak reguler.

#### 2. Kelas Reguler dengan Cluster

ABK akan belajar bersama anak reguler dalam satu kelas akan tetapi

dikelompokkan dalam kelompok khusus

#### 3. Kelas Reguler dengan *Pull Out*

ABK belajar bersama anak non-ABK di kelas reguler. Pada waktu-waktu tertentu ABK akan ditarik dari kelas reguler untuk mendapatkan bimbingan khusus dengan guru pembimbing yang lebih ahli.

#### 4. Kelas Reguler dengan *Cluster* dan *Pull Out*

ABK belajar bersama anak non-ABK berada dalam kelas reguler dengan kelompok khusus serta dalam waktu-waktu tertentu ABK akan ditarik ke ruang lain untuk belajar bersama guru pendamping khusus

#### 5. Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

ABK akan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler akan tetapi dalam bidang tertentu ia dapat belajar bersama anak non-ABK di kelas reguler.

#### 6. Kelas Khusus Penuh

ABK akan belajar pada sekolah reguler akan tetapi dalam kelas khusus.

Guru memiliki kunci dalam suksesnya elaborasi *EFA* dan pendidikan inklusi. Diperlukannya sebuah perubahan pandangan dari nasionalisme sempit menuju ke universalisme, dari etnisitas ke budaya toleransi, pemahaman kaku ke pluralisme, otokrasi menjadi demokrasi di dalam berbagai manifestasi. Berbagai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam abad ke-21 ini dan memandang jauh ke depannya, menempatkan sebuah tanggung jawab besar bagi seorang guru di dalam partisipasinya mencetak dan mengembangkan karakter generasi baru. Kualitas pendidikan yang meningkat merupakan dambaan setiap rakyat, akan tetapi hal ini harus diimbangi dengan berbagai terobosan dan upaya dalam mendongkrak kinerja guru, seperti: meningkatkan perekrutan, mengadakan pelatihan bermutu dan intensif,

meningkatkan pendapatan dan status sosial, serta memperhatikan keajaiban guru; para guru juga membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, karakteristik pribadi, prospek profesional, serta motivasi apabila mereka menginginkan harapan yang ditempatkan di atas mereka (Tati Krisnawaty 2019, 238).

Guru dalam bersikap terhadap pendidikan inklusi merupakan sebuah gambaran yang positif maupun negatif dari komitmen yang sudah dipatuhi guru dalam mengembangkan ABK yang menjadi tanggung jawabnya, selain itu juga menggambarkan sejauh mana ABK diterima di dalam sebuah sekolah (Elisa dan Wrastari 2013, 4). Melalui sikap positifnya, guru dapat memberikan ABK mendapat kesempatan yang lebih banyak untuk belajar bersama teman sebayanya dan mendapatkan keuntungan dari pendidikan dengan semaksimal mungkin.

Kehadiran konsep pendidikan inklusif telah dicetuskan sejak satu dasawarsa lalu, akan tetapi dengan adanya pasang surut minat terhadap penggunaan konsep ini, konsep pendidikan inklusi menjadi terbenam. Beberapa waktu belakangan pendidikan inklusi telah bangun dari “mati suri” dengan digagas dan dibumikannya pendidikan inklusi oleh pemerintah. Dibumikannya pendidikan inklusi diharapkan akan dapat menghapus atau setidaknya meminimalisir diskriminasi dan segregasi anak-anak khususnya bagi anak difabel atau kebutuhan khusus dengan anak reguler, integrasi yang terjadi antar anak ini di dalam satu pembelajaran diharapkan mereka dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, serta bersosialisasi antara teman sebayanya. Selain itu, adanya *operant conditioning* akan merespon perilaku sebagaimana teman sebayanya (Hanur 2018, 29).

Terjadi sebuah dilema perbedaan yang khususnya terjadi pada masalah “fokus khusus dalam perbedaan”.

Diberikannya perlakuan khusus bagi kaum difabel di satu sisi perlakuan ini seperti melanggar diskriminasi. Sedangkan dalam hal ini apabila perbedaan tidak diakui dan tidak diperlakukan secara khusus, maka ada kemungkinan perbedaan-perbedaan itu tidak akan ditangani. Oleh karenanya diperlukan strategi dan sinergi dari semua pihak agar terwujud dan semakin berkembangnya pendidikan inklusi.

Program “*Education for All*” yang digagas komunitas internasional dan pendidikan inklusi sebagai inisiatif pengembangannya, keduanya merupakan bukti dari keprihatinan global terhadap tingginya kasus diskriminasi di bidang pendidikan pada khususnya. Pendidikan, merupakan konsep yang jauh lebih luas daripada hanya sekedar memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Pendidikan inklusif khususnya bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan serangkaian nilai serta keyakinan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua anak agar dapat berpartisipasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan inklusi memiliki potensi untuk dapat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tambah dalam pendidikan inklusi ini tidak hanya dalam upaya meningkatkan masalah kualitas pendidikan, akan tetapi juga ke arah yang lebih penting yaitu mengenai nilai keadilan sosial. Pendidikan inklusi menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk secara kritis mengawal institusi sosial dan strukturnya untuk menegakkan pendidikan anti diskriminasi. Hal ini tentunya akan menantang konsep pengajaran didaktis yang berpusat pada guru, hafalan, dan lainnya, dengan demikian maka akan membuka peluang untuk mengembangkan pedagogi yang lebih baik lagi dan kompetensi yang lebih besar yang sulit untuk dicapai hanya dengan komitmen “*education for all*”.

Pendidikan inklusi tidak boleh mengabaikan budaya dan masa kecil anak-anak. Terdapat prinsip budaya di dalam layanan bagi anak-anak, oleh sebab itu prinsip budaya dalam memberi layanan pendidikan inklusi pada pendidikan inklusi sebagai berikut: 1). Jalinan kerjasama dan komunikasi terbuka dengan keluarga anak sebagai upaya mendapatkan informasi pribadi keluarga ABK akan membuat program inklusi berjalan lebih baik; 2). Penanganan ABK di luar guru ataupun keterlibatan pihak lain dalam membantu menangani kesulitan serta hambatan ABK membutuhkan persetujuan serta kerjasama nyata agar dapat berjalan dengan lancar; 3). Keterlibatan aktif bagi promosi pemberian kesempatan dan praktik anti-bias yang sama, sehingga semua anak dan keluarga akan merasa ikut andil dan dihargai; 4). Mempunyai kebijakan serta prosedur kuat mengenai kebijakan inklusi dimana kebijakan yang dibuat akan memberikan kesempatan yang sama; 5). Mengakui serta menilai bahwa setiap anak memiliki keunikan dan memiliki ritme perkembangan mereka sendiri; 6). Adanya program inklusi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anak dan menyadari bahwa tidak semua anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan tambahan; 7). Memberikan dorongan anak untuk mengenali kualitas masing-masing dan karakteristik yang mereka keluarkan bersama teman sebayanya; 8). Anak diberikan kesempatan dalam mengambil keputusan mengenai pembelajaran mereka; 9). Menghormati semua jenis keragaman anak, keluarga, serta masyarakat dalam memberi layanan kepada mereka dalam masa pendidikannya; 10). Setiap anak memiliki kebutuhan, pandangan, serta budaya dan kepercayaan individu yang harus dipahami dan diperlakukan secara hormat pada saat pendidikan berlangsung; 11). Merefleksikan sikap serta nilai diri kita

sendiri (Departement of Children and Youth Affairs 2016, 4).

Di dalam meraih kesuksesan dalam pendidikan inklusi dapat dilihat dari beberapa karakteristik individunya, diantaranya adalah: otonomi yang menyangkut mengenai kebebasan menentukan pilihan, menjaga hubungan dengan orang lain, interdependensi, memiliki keselamatan serta kepercayaan, mempunyai harga diri serta rasa memiliki, dapat memanfaatkan kesempatan untuk bertindak baik hari dengan orang lain, berprinsip tidak selalu menerima apabila memberi, regulasi diri, memiliki kemampuan berkomunikasi, kegembiraan, dan lainnya. Karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik baik yang ABK maupun non-ABK memiliki karakteristik pendidik yang memiliki peran sebagai fasilitator atau sebagai penghubung ABK dengan lingkungannya dalam meraih tujuan pendidikannya (Hajar dan Mulyani 2017, 45).

Praktik pelaksanaan pendidikan inklusi pastilah mengalami kendala dan masalah yang mengganggu. Di ker mengemukakan berbagai cara dalam menghadapi hambatan saat pelaksanaan inklusi. Guru dapat menggunakan waktu untuk saling berdiskusi masalah dan mempersiapkan pengajaran, selain itu guru juga dapat bekerjasama dengan guru pendamping saat kegiatan belajar kelompok maupun saat belajar mandiri. Guru juga dapat memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk mengevaluasi dirinya. Penggunaan musik saat waktu yang senggang sebagai hiburan juga akan membantu mengurangi beban, pergunakan waktu sebelum maupun sesudah kegiatan sekolah dengan anak, melakukan diskusi rutin dan berkala, membuat skala prioritas, tim inti dapat menggunakan waktu perencanaan tambahan setiap hari dan kemudian satu hari setiap minggu staf pendukung (bimbingan, konselor, psikolog, dll) akan

diundang untuk pertemuan (Lisa 2010, 20).

Pendidikan inklusi telah menawarkan kesempatan bagi EFA untuk memulai membuat sebuah perbedaan antara revolusi moral dan sistem mekanis. Pendidikan inklusif menawarkan kesempatan bagi “*Education for All*” atau pendidikan untuk semua bukan hanya mengenai “gelandangan yang dapat duduk di kursi” akan tetapi meninjau ulang konsepsi mengenai sekolah dan tujuan pendidikan yang dalam hal ini tujuan pendidikan nasional Indonesia tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003. Selanjutnya terdapat peraturan terbaru yang dikeluarkan menteri pemberdayaan perempuan dan anak (PPA) yang merangkul anak difabilitas yaitu PerMen PPPA 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Elaborasi keduanya merupakan sebuah kesempatan bagi siapa saja untuk dapat terlibat dalam perdebatan pemikiran yang dahulu dianggap sebagai hal yang istimewa bagi seorang rakyat biasa.

Kolaborasi antara EFA dengan pendidikan inklusi membantu kita untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai pendidikan, yaitu “apa peran pendidikan?”, “apakah tugas utama pendidikan? Apakah untuk dapat mengembangkan individu yang melek huruf dan angka?”, ataupun “apakah nilai-nilai inti pendidikan dibangun berdasarkan berbagai interaksi sosial?”, dan lain sebagainya. Selain itu, pendidikan inklusi bukan hanya mengenai penanganan masalah input misalkan saja akses, dan yang terkait dengan proses misalnya pelatihan guru, inklusi tidak membuat pergeseran nilai-nilai dan kepercayaan pada seluruh sistemnya. Nilai-nilai dan kepercayaan telah tercermin dalam setiap kebijakan yang dibingkai di berbagai sekolah dan sistem yang dibangun (Miles dan Singal 2010, 15). Semakin menelaah mengenai

konsep pendidikan untuk semua dapat memungkinkan para pembuat kebijakan dan praktisi untuk dapat mengeksplorasi peluang yang ada di dalam bangsa ini dari pada mencari solusi teknologi dari luar. Mengembangkan pemahaman lokal mengenai konsep kompleksnya “pendidikan”, “*education for all*”, dan “inklusi” sangat penting bagi upaya pengembangan dan kebijakan yang berkelanjutan mengenai pengajaran dan pembelajaran. Kolaborasi “*Education for All*” dengan diselenggarakannya pendidikan inklusi sangat penting bagi pengembangan berkelanjutan yang inovatif dan berbudaya. “*Millenium Development Goals*” merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat global untuk dapat mewujudkan ini maka langkah awal adalah penyediaan pendidikan yang memadai dan bermutu serta menolak keras diskriminasi.

Pelaksanaan pendidikan inklusi merupakan bentuk nyata dari dilaksanakannya komitmen internasional untuk meniadakan diskriminasi dan pemberian hak pendidikan pada semua anak. Pendidikan inklusi harus menjadi perhatian segenap pihak. Dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia, diperlukan beberapa hal agar semua pihak siap untuk menerima semua anak dalam lingkup yang sama (Suwandayani 2019, 46). Kemampuan dan ketrampilan guru harus dipersiapkan untuk membuat inovasi terbaru dan siap terhadap segala keadaan. Dibutuhkan gurunya manusia dalam mensukseskan program ini. Guru manusia merupakan guru yang memiliki keihkalasan dalam mengajar dan belajar dan senantiasa belajar untuk dapat mengembangkan kompetensi dirinya sehingga berpengaruh kepada anak didiknya (Chatib 2012, 57). Perlunya lembaga pendidikan yang welcome terhadap ABK dan meniadakan stereotip negatif mengenai sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kurikulum yang digunakan harus ramah

terhadap ABK dan menyesuaikan kelas inklusi. Pemerintah harus senantiasa mengawasi dan memberikan edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi sangat memerlukan guru yang inklusif. Guru inklusif merupakan guru yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan siswa yang memiliki keunikan masing-masing baik dari segi intelegensi, afektif, psikomotor, dan lainnya dalam satu kelas yang inklusif dengan berbagai cara yang dapat mengakomodir semua kebutuhan belajar anak dengan melakukan inovasi dan modifikasi dalam kurikulum, metode mengajar, fasilitas, serta sistem evaluasi atau penilaian yang adapat digunakan bagi semua siswa yang ada di dalam lingkup kelas inklusif tersebut. Sekolah-sekolah inklusi sangat membutuhkan kurikulum, metode mengajar, sarana dan prasarana, serta sistem evaluasi serta tentunya guru khusus yang dapat diintegrasikan-interkoneksi kepada kelas reguler yang mempunyai anak berkebutuhan khusus untuk dapat memberikan sebuah tempat dan penanganan yang tepat dan sesuai bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler.

Kepada Pemerintah ataupun instansi terkait diharapkan juga dapat andil mempersiapkan program pendidikan inklusi dengan lebih terencana dan seharusnya melakukan sosialisasi pendidikan inklusi pada perangkat pendidikan dan masyarakat, serta menyelenggarakan pelatihan bagi guru agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah juga diharapkan dapat mempersiapkan dan merencanakan berbagai program pendidikan inklusi tanpa melupakan perhatiannya kepada kinerja guru serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Guru sebagai pendidik dan pembimbing diharapkan lebih mampu untuk dapat menyesuaikan

diri dengan keadaan siswa yang beraneka ragam. Kepala pemerintah, sekolah, dan orang tua diharapkan dapat bersinergi dalam memfasilitasi anak berkebutuhan khusus sehingga dapat membantu proses pelaksanaan pendidikan inklusi (Linda, Pitoewas, dan Yanzi 2016, 12–13). Elaborasi antara program internasional “*Education for All*” dengan pendidikan inklusi serta sinergi yang diciptakan antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat diharapkan mampu menumbangkan diskriminasi yang selama ini mengungkung anak-anak difabel serta anak yang berkebutuhan khusus lainnya.

### **Kesimpulan**

Dari berbagai pemikiran yang sudah di paparkan di atas, kami dapat menyimpulkan berbagai hal mengenai elaborasi “*Education for All*” dengan pendidikan inklusi dalam menumbangkan diskriminasi pada dunia pendidikan.. Pendidikan inklusi diharapkan untuk mampu dalam menjamin terwujudnya “*Education for All*” sebagai salah satu upaya menumbangkan hegemoni diskriminasi dan kesetaraan yang sudah mengakar. Model pendidikan inklusi dianggap sebagai model pendidikan yang akan mampu menjamin bagi terwujudnya prinsip “*Education for All*” sebagai salah satu cara untuk memberantas diskriminasi dan kesetaraan, sebagai strategi untuk mendorong adanya demokratisasi, serta sebagai alat untuk menghapus marginalisasi atas sekelompok manusia. Pendidikan inklusif khususnya bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dan serangkaian nilai serta keyakinan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua anak agar dapat berpartisipasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan inklusi memiliki potensi untuk dapat mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai tambah dalam pendidikan inklusi ini tidak hanya dalam upaya meningkatkan masalah kualitas

pendidikan, akan tetapi juga ke arah yang lebih penting yaitu mengenai nilai keadilan sosial. Pendidikan inklusi menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk secara kritis mengawal institusi sosial dan strukturnya untuk menegakkan pendidikan anti deskriminasi. Hal ini tentunya akan menantang konsep pengajaran didaktis yang berpusat pada guru, hafalan, dan lainnya, dengan demikian maka akan membuka peluang untuk mengembangkan pedagodi yang lebih baik lagi dan kompetensi yang lebih besar yang sulit untuk dicapai hanya dengan komitmen “*Education for All*”.

### Daftar Rujukan

- Asyhabuddin. (2008). “Difabilitas dan Pendidikan Inklusif: Kemungkinannya di STAIN Purwokerto.” *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan* 13(3).
- Chatib, Munif. (2012). *Gurunya Manusia: Menjadikan Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*. Bandung: Kaifa Learning.
- Departement of Children and Youth Affairs 2016. (2016). *Diversity, Equality and Inclusion Charter, and Guidelines for Early Childhood Care and Education*. Dublin: Government Publications.
- Elisa, Syafrida, dan Aryani Tri Wrastari. (2013). “Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap.” *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* 2(1).
- Hajar, Siti, dan MG Sri Roch Mulyani. (2017). “Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan Dan Inklusi Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).” *JURNAL MITRA SWARA GANESHA* 4(2). <http://ejournal.utp.ac.id/index.php/JMSG/article/view/567> (Oktober 15, 2019).
- Hanur, Binti Su’aidah. (2018). “Melayani dengan Hati: Menghapus Diskriminasi dan Segregasi antara Anak Reguler dengan Anak Berkebutuhan Khusus melalui Sekolah inklusif YBPK Kota Kediri.” *Jurnal al – Hikmah* 6(2).
- Hastuti, Rika Kumala Dewi, Rezanti Putri Pramana, dan Hariyanti Sadaly. (2019). “Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas.”
- Ki-Moon, Ban. (2007). *Children and The Millennium Development Goals : Progress towards A World Fit for Children*. New York: UNICEF.
- Kusumawardhana, Indra, dan Arry Bainus. (2012). “A Coxian Approach: Mengungkap Hegemoni Agenda ‘Education For All’ terhadap Negara Berkembang.” *Global and Strategis Journal* 12.
- Linda, Ferba, Berchah Pitoewas, dan Hermi Yanzi. (2016). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Guru Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi.” *Jurnal Kultur Demokrasi* 4(5). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/11367> (Oktober 15, 2019).
- Lisa, Dieker A. (2010). *Creating Effective Inclusion Schools and*

- Classrooms*. Florida: University of Central Florida.
- Miles, Susie, dan Nidhi Singal. (2010). "The Education For All And Inclusive Education Debate: Conflict, Contradiction Or Opportunity?" *International Journal of Inclusive Education*.
- Nadzir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Rahim, Abdul. (2016). "Pendidikan Inklusif sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua." *Trihayu: Jurnal pendidikan ke-SD-an* 3(1').
- Rezeki, Nurul Fadhilah, dan Binahayati Rusyidi. (2015). "Pekerja Sosial Dan Pendidikan Inklusi." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2(2).  
<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13531> (Oktober 15, 2019).
- Suwandayani, Beti Istanti. (2019). "Pendidikan Inklusi Berbasis Kontekstual di Sekolah Dasar." *ELSE (Elementary School Education Journal)* 3(1).
- Suyahman, Suyahman. (2016). "Pendidikan Untuk Semua Antara Harapan Dan Kenyataan (Studi Kasus Permasalahan Pendidikan Di Indonesia)." *Prosiding Ilmu Pendidikan* 1(2).  
<http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pip/article/view/7733> (Oktober 15, 2019).
- Tati Krisnawaty. (2019). *Modul Pendidikan HAM Berperspektif Gender untuk Guru dan Sederajat*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Taqiyuddin. (2005). *Pendidikan untuk Semua*. Cirebon: STAIN Cirebon Press.
- UNESCO. (1990). *World Declaration on Education for All*. Paris: UNESCO.
- . (2008). "Global Monitoring Report on Education for All."
- UNICEF. (2005). *The State of The World's Children 2006: Excluded and Invisible*. New York: UNICEF.
- Yusainy, Cleoputri, Slamet Thohar, dan Rachmad Gustomy. (2016). "#StopAbleism: Reduksi Stigma kepada Penyandang Disabilitas melalui Intervensi Bias Implisit." *Jurnal Psikologi* 43(1).
- Zuriah, Nurul. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.